

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Infrastruktur jalan memiliki peran yang sangat penting sebagai sarana transportasi dalam memperlancar aktivitas masyarakat sehari-hari. Jalan merupakan prasarana infrastruktur dasar yang dibutuhkan manusia untuk dapat melakukan pergerakan dari suatu lokasi ke lokasi lainnya dalam rangka pemenuhan kebutuhan. Ketersediaan jalan menjadi hal yang sangat penting karena memiliki peran yang cukup besar dalam pertumbuhan ekonomi di setiap daerah. Keberadaan infrastruktur yang memadai sangat diperlukan seperti halnya infrastruktur jalan dan jembatan agar perekonomian dapat berfungsi dengan baik. Istilah ini umumnya merujuk kepada hal infrastruktur teknis atau fisik yang mendukung jaringan struktur. Infrastruktur tersebut antara lain dapat berupa jalan, kereta api, air bersih, bandara, kanal, waduk, tanggul, pengelolaan limbah, perlistrikan, telekomunikasi, pelabuhan secara fungsional.

Pemerintah daerah adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip ekonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Di era otonomi daerah Indonesia saat ini, telah ditekankan

pemberian kewenangan yang luas kepada pemerintah daerah agar dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, memberdayakan mereka, menjamin proses demokratisasi, perlindungan hak dan jaminan kehidupan lainnya. Seiring dengan dilaksanakan kebijakan otonomi daerah di Indonesia tanggungjawab penyelenggaraan dalam pemeliharaan infrastruktur jalan beralih ke pemerintah daerah. Peralihan tanggung jawab tersebut sudah sewajarnya harus dapat diimbangi dengan kemampuan pemerintah daerah dalam kemampuan teknik, manajerial dan pembiayaan dalam penyelenggaraan jalan.

Di kabupaten Pringsewu, tepatnya jalan provinsi di Kecamatan Sukoharjo kewenangan terhadap penyelenggaraan dan pemeliharaan infrastruktur jalan berada Dinas Bina Marga Provinsi Lampung, karena ruas jalan Sukoharjo yang berada di Kabupaten Pringsewu merupakan jalan Provinsi, dimana Dinas Bina Marga Provinsi Lampung yang memiliki kewenangan. Melalui adanya pelimpahan kewenangan tersebut, maka dapat dijadikan acuan kinerja dari Dinas Bina Marga Provinsi Lampung untuk penyelenggaraan dan pemeliharaan infrastruktur jalan dalam rangka penyediaan pelayanan infrastruktur jalan yang baik dan demi kesejahteraan masyarakat. Mengingat pentingnya peran jalan sebagai sarana transportasi yang merupakan unsur penting dalam kehidupan sehari-hari dan meningkatkan roda perekonomian masyarakat.

Berdasarkan, pengamatan peneliti yang dilakukan 15 Juni 2015 pada : jalan provinsi di wilayah Pringsewu, khususnya dari Jalan KH. Kholib arah utara

hingga Kecamatan Sukoharjo, tepatnya perempatan Pasar Sukoharjo dan Bandungbaru, rusak dan semakin lama semakin parah. Hujan yang terus mengguyur wilayah tersebut membuat kondisi badan jalan nyaris seperti kubangan dan kolam tempat mandi kerbau. Mulai di Pekon Podosari yang merupakan wilayah Kecamatan Pringsewu, jalan sudah sangat sulit di lalui roda dua, bahkan roda empatpun harus pelan-pelan karena jalan tertutup lumpur dan air. Kemudian, kondisi infrastruktur penunjang jalan seperti bahu jalan dan fasilitas pejalan kaki dan juga sistem drainase yang ada di ruas Jalan Kecamatan Sukoharjo tersebut belum berfungsi dengan baik.

Seperti yang diberitakan dalam surat kabar harian Radar Lampung (Edisi 20 Februari 2015), diberitakan bahwa ruas jalan Sukoharjo tersebut belum juga diperbaiki oleh pemerintah khususnya Dinas Bina Marga. Meskipun telah berulang kali memakan korban, seperti yang terjadi pada truk yang terguling tepatnya diruas jalan Sukoharjo III, kompleks Pasar Sukoharjo, Jumat (20/2), sekitar pukul 16.30 WIB truk bermuatan kayu balok tersebut terguling akibat supir tak kuasa menghindari banyaknya lubang-lubang jalan yang tertutup genangan air bercampur lumpur sepanjang ruas jalan itu. Meskipun masyarakat telah meminta kepada pemerintah segera membenahi jalan rusak yang sudah berlangsung bertahun-tahun tersebut, namun masih tidak ada respon positif dari pihak yang terkait. Terlebih, kubangan itu bercampur lumpur dan tak kunjung surut walau tidak turun hujan. Akibat kerusakan jalan di Sukoharjo menimbulkan pungli baru dan mengajarkan masyarakat untuk mengemis. Pada setiap titik jalan yang rusak, tampak warga mengadahkan tangan meminta

sejumlah uang pada pengguna jalan. "Jika memang tidak ada realisasi perbaikan jalan tersebut, warga Sukoharjo sementara akan menutup ruas jalan ini sampai ada perbaikan. Meskipun ratusan warga telah berunjuk rasa dengan menanam pohon pisang di tengah jalan tepatnya depan Pasar Sukoharjo. Unjuk rasa pun dilakukan warga karena ketidakpuasaan mereka terhadap kinerja pemerintah setempat lantaran ruas jalan yang rusak hanya di timbun sabes. Terlebih jalan tersebut merupakan ruas jalan provinsi yang menghubungkan antara Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Pringsewu dan Kabupaten Lampung Tengah.

Seperti yang dituturkan Rahmadi (42 tahun) warga Kecamatan Sukoharjo, bahwa setiap hari banyak sekali truk pengangkut batu yang melewati jalanan, truk tersebut bermuatan kurang lebih 15 ton, sedangkan jalan disini hanya sanggup menahan berat kurang lebih sekitar 8 ton, apabila kondisi seperti ini terus terjadi bukan tidak mungkin jalan bisa semakin parah dan juga semakin banyak warga yang jadi korban. Kondisi yang cukup parah terjadi tepatnya di depan Pasar Sukoharjo, di lokasi itu banyak sekali kubangan atau jalan berlubang dengan diameter yang cukup besar sehingga sangat membahayakan bagi pengguna kendaraan bermotor yang melintasi jalan tersebut.

Kerusakan infrastruktur jalan yang terjadi di Kecamatan Sukoharjo menandakan bahwa kinerja Dinas Bina Marga Provinsi Lampung masih belum optimal, dilihat dari ruas jalan di Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Pringsewu yang masih banyak nya jalan dan infratsruktur penunjang lainnya yang tidak

terpelihara dengan baik. Seperti yang diketahui Dinas Bina Marga Provinsi Lampung mempunyai tugas dan fungsi sebagai penyelenggara terciptanya infrastruktur yang baik, menyediakan sarana dan prasarana bagi masyarakat dalam bidang pemeliharaan, pembangunan, pengembangan dan peningkatan jalan dan jembatan yang rusak, hal tersebut sesuai dengan Undang-Undang Nomor. 38 Tahun 2004 Pasal 16 ayat 1 tentang Jalan, yaitu wewenang pemerintah Provinsi dalam penyelenggaraan jalan meliputi penyelenggaraan jalan kabupaten dan jalan desa.

Studi yang serupa pernah dilakukan di Kabupaten Belitung oleh Nuansa Nurul Huda (2012) menggambarkan bahwa pelaksanaan perbaikan dan peningkatan infrastruktur jalan Kabupaten Belitung oleh Dinas Pekerjaan Umum masih kurang maksimal masih banyak titik-titik kerusakan jalan yang sangat parah. Berdasarkan penelitian terdahulu yang relevan di atas, dalam penelitian ini mempunyai jenis analisis data yang sama yaitu menggunakan metode deskriptif kualitatif kemudian persamaan yang mendasar dalam penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah sama-sama meneliti kinerja Dinas Bina Marga dalam pemeliharaan infrastruktur jalan, berdasarkan uraian tersebut, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai Kinerja Dinas Bina Marga Provinsi Lampung dalam pemeliharaan infrastruktur jalan di Kecamatan Sukoharjo, sehingga penelitian terdahulu menjadi referensi sendiri bagi peneliti kemudian, yang membedakannya adalah fokus penelitian terdahulu dan fokus penelitian yang peneliti ambil, yaitu pada fokus penelitian terdahulu mengacu pada perkembangan kinerja pihak Dinas Pekerjaan Umum

Kabupaten Belitung dalam pelaksanaan perbaikan dan peningkatan infrastruktur jalan Kabupaten Belitung dan dalam penelitian terdahulu menganalisis tentang struktur organisasi dari Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Belitung, sedangkan fokus penelitian yang peneliti ambil dalam penelitian ini yaitu mengukur kinerja Dinas Bina Marga Provinsi Lampung dalam pemeliharaan infrastruktur jalan di Kecamatan Sukoharjo sesuai dengan petunjuk teknis kegiatan pemeliharaan jalan yang meliputi :

1. Struktur perkerasan jalan;
2. Bahu jalan dan fasilitas pejalan kaki;
3. Fasilitas drainase jalan.

Berdasarkan masalah yang telah dipaparkan diatas, maka peneliti tertarik untuk meneliti Kinerja Dinas Bina Marga Provinsi Lampung dalam pemeliharaan jalan, agar kedepannya kerusakan infrastruktur jalan dapat ditangani dengan cepat dan serius sehingga pengguna jalan dapat menikmati fasilitas publik dengan baik karena mengingat jalan merupakan sarana penting penunjang kegiatan dan aktivitas masyarakat sehari-hari.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini: Bagaimana Kinerja Dinas Bina Marga Provinsi Lampung dalam Pemeliharaan Infrastruktur Jalan di Kecamatan Sukoharjo?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan masalah dalam penelitian ini, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan kinerja Dinas Bina Marga Provinsi Lampung dalam pemeliharaan infrastruktur jalan di Kecamatan Sukoharjo

D. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan baik secara teoritis maupun secara praktis, yaitu sebagai berikut :

1. Secara teoritis, dari hasil penelitian ini peneliti berharap dapat memberikan kajian dalam pengembangan Ilmu Pemerintahan khususnya yang berhubungan dengan kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)
2. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai sumbang saran dan masukan bagi pemerintah khususnya bagi Dinas Bina Marga Provinsi Lampung dalam pemeliharaan infrastruktur jalan.